

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi beberapa penelitian ini masih dalam tema yang sama dengan penelitian.

Kesatu, penelitian Listya (2011) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena yang dikaji adalah penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Penelitian ini mengukur besarnya pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap

keberhasilan proyek pada proyek PNPM Mandiri Pedesaan menurut masyarakat yang terlibat berdasarkan pada analisis *SEM*(*Structural Equation Modelling*). Hal ini penting dilakukan agar masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini antara lain variabel partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi adalah tahapan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan bentuk partisipasi, karena tahapan partisipasi merupakan proses awal yang paling penting tahu mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan untuk tingkat keberhasilan proyek, variable yang paling berpengaruh adalah kesesuaian tindakan aktor yang terlibat. Yang menunjukkan bahwa lebih berpengaruh dibandingkan variable lainnya, yang mana menunjukkan besarnya kekuatan masyarakat dalam suatu proyek dapat mencapai yang sesuai target pada rencana awal proyek.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Kholidah Attina Yopa dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya di Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata Budaya Kebondalemkidul, (2) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Desa

Wisata Budaya Kebondalemkidul, (3) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata Budaya Kebondalemkidul, (4) keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata Budaya Kebondalemkidul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) model pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membangun kesadaran ekonomi, penguatan kapasitas, dan pendayaan, (2) strategi pemberdayaan yang dilakukan yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, pengembangan modal masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok, penyediaan informasi tepat guna. (3) faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kebondalemkidul yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi, terdapat potensi situs budaya Candi Sojiwan, dukungan dari pihak luar yaitu (Taman Wisata Candi), UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), Dinas Pariwisata, tersedianya paket wisata yang bergabung dengan Candi Prambanan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum adanya regenerasi pengurus desa wisata, pemerintah desa setempat kurang *support*, anggaran atau dana untuk pengembangan desa wisata masih minim. (4) Keberhasilan yang dicapai dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yaitu ditunjukkan dengan kemampuan melakukan peningkatan produksi usaha dan menjangkau faktor-faktor produksi, kemampuan melakukan distribusi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, kemampuan mengkonsumsi barang-barang kebutuhan hidup.

Ketiga, penelitian Simbolon (2007) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kegiatan pembinaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Belawan telah cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan kegiatan.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Pratiwi Mega Septiani dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat. Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah. Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan dalam penggemukan sapi? Apakah ada perubahan perekonomian bagi warga dengan adanya penggemukan sapi di Dusun satu Kecubung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kemitraan melalui proses penggemukan sapi menunjukkan hasil positif, masyarakat memperoleh keuntungan selama melaksanakan penggemukan sapi selama 4 bulan rata-rata mendapat hasil 1 sapi Rp. 1.000.000 lebih, dalam 1 bulan, untuk 4 ekor sapi mendapatkan tambahan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000 per bulan. Sehingga peserta yang mengikuti program PIR mendapat tambahan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000 per bulan. Dengan demikian ekonomi rumah tangga mereka mengalami

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Listya 2011	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek	Hasil dari penelitian ini antara lain partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi adalah tahapan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan bentuk partisipasi, karena tahapan partisipasi merupakan proses awal yang paling penting tahu mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan untuk tingkat keberhasilan proyek, variable yang paling berpengaruh adalah kesesuaian tindakan aktor yang terlibat. Yang menunjukkan bahwa lebih berpengaruh dibandingkan variable lainnya,

			yang mana menunjukkan besarnya kekuatan masyarakat dalam suatu proyek dapat mencapai yang sesuai target pada rencana awal proyek.
Perbedaan			
Perbedaan dengan yang ada di banyuwangi berbeda dengan pemberdayaan masyarakat melewati partisipasi komunitas. penelitian ini terkait pengaruh partisipasi masyarakat mengenai tingkat keberhasilan proyek			
2.	Kholida 2017	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) model pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membangun kesadaran ekonomi, penguatan kapasitas, dan pendayaan, (2) strategi pemberdayaan yang dilakukan yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, pengembangan modal masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok, penyediaan informasi tepat guna.
Penelitian ini membahas faktor penguatan kapasitas ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia melewati wisata budaya berbeda dengan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi komunitas.			
3.	Simbolan 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan.	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Belawan telah cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan kegiatan.
Perhatian partisipasi ini terkait dengan program dari kelurahan untuk perencanaan proses kegiatan berbeda dengan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi komunitas.			

4.	Pratiwi Mega 2017	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kemitraan melalui proses penggemukan sapi menunjukkan hasil positif, masyarakat memperoleh keuntungan selama melaksanakan penggemukan sapi selama 4 bulan rata-rata mendapat hasil 1 sapi Rp. 1.000.000 lebih, dalam 1 bulan, untuk 4 ekor sapi mendapatkan tambahan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000 per bulan. Sehingga peserta yang mengikuti program PIR mendapat tambahan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000 per bulan. Dengan demikian ekonomi rumah tangga mereka yang mengalami.
Perbedaan dengan penelitian ini masyarakat berpartisipasi untuk meningkatkan ekonomi dari pengemukan sapi yang ada di desa. berbeda dengan penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi komunitas.			

Sumber : data di akses tahun 2019

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Masyarakat

Shardlow (1998: 32) melihat bahwa berbagai pengertian tentang pemberdayaan pada dasarnya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas mencoba mengendalikan hidup mereka sendiri dan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah gagasan tidak berbeda secara signifikan dari gagasan Biestek (1961), yang dikenal di bidang pendidikan sosial sebagai penentuan nasib sendiri. Pada dasarnya,

prinsip ini mendorong klien untuk memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, sehingga klien dapat membentuk masa depannya dengan penuh kesadaran dan kekuatan(Adi, 2008 : 78).

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995)

Secara garis besar menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), pengertian pemberdayaan masyarakat mengandung dua arti, yaitu: *to give ability or enable to*, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan

dan *to give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Ini berarti bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (*taking control over their lives, setting their own agendas skill, building self confidence, solving problems and developing self reliance*). Kemandirian merupakan proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi, dan subordinasi. Menurut Sumaryadi (2005:114), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi; pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. Kedua, memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya. Ketiga, penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dengan fasilitas-fasilitasnya. Menurut Paul (dalam Suparjan dan Hempri 2003:43), bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-

hasil pembangunan. Menurut Borrini (dalam Suparjan dan Hempri 2003:43), pemberdayaan merupakan konsep yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Sementara Sutrisno menyatakan *empowermen* bukan sekedar memberikan kesempatan masyarakat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opersif. Konsep lain diungkapkan oleh Prijono dan Pranaka yang menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yaitu mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Pemberdayaan dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil dari berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses pertumbuhan kekuasaan dan kemampuan dari masyarakat lemah atau bawah, terpinggirkan dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan masyarakat bawah bisa terangkat dan muncul menjadi bagian masyarakat menengah ke atas. Berdasarkan hasil penelitian Murtadho yang berjudul usaha kelompok ternak

selasa pon dalam 18 memberdayakan ekonomi anggotannya, bahwa masyarakat bisa berdaya dengan kegiatan usaha mandiri (KUM) dalam anggota kelompok ternak, sehingga ekonomi para pelaku ternak selasa pon meningkat kesejahteraannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan.

2. Tujuan Pemberdayaan

Masyarakat Menurut Sumaryadi (2005:142), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial-ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Sulistiyani (2004:80), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Menurut Suharto (2005:60), tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil

Meneurut Hikmat (2006:135), tujuan pemberdayaan yaitu untuk menumbuhkembangkan nilai tamba ekonomis nilai, tetapi juga nilai tambah sosial-budaya. Karena itu, kajian strategis pemberdayaan masyarakat baik masalah ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi sangat penting sebagai masukan untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Melalui program pemberdayaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun diri secara partisipatif. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari pemberdayaan merupakan upaya penyadaran bahwa tujuan pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen yang bias di kelola untuk dikembangkan semua itu merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pemberdayaan.

3. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005:54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak

memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Prinsip dari program pemberdayaan tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat, berangkat dari 4 prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan seyogyanya program pemberdayaan dapat di laksanakan

oleh pelaku pemberdayaan serta partisipasi masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya. Dari ke-4 prinsip diatas dapat kita ketahui bahwa program pemberdayaan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan, karena program pemberdayaan adalah suatu cara untuk memberikan daya pada masyarakat yang kurang berdaya.

4. Tahap Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan tentu tidak terlepas dari bagaimana tahapan pengembangan agar program ataupun kegiatan bisa berjalan dengan fokus sesuai tujuan. Tahapan pengembangan masyarakat memiliki beberapa versi. Secara sederhana Adi menjelaskan tahapan-tahapan tersebut dapat dicakupkan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan, mencakup pada tahapan persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas yang dimaksud yaitu adanya tenaga petugas yang mampu mengkoordinir perencanaan pengembangan, dan persiapan lapangan yang dimaksud adalah sejauh mana lokasi lingkungan masyarakat berpotensi untuk dijadikannya tempat pengembangan masyarakat.
- b. Tahapan assessment, yaitu melakukan pengidentifikasian masalah untuk menemukan fokus masalah sesuai kebutuhan yang dirasakan

oleh masyarakat dan pelaku pemberdayaan dan sumber daya yang dimiliki.

- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, yaitu pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- d. Tahap pemformulasian rencana aksi. Dalam tahap ini pelaku perubahan membantu kelompok masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahap implementasi program. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena suatu perencanaan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antar pelaku perubahan dengan warga masyarakat.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pengawasan diharapkan melibatkan warga yang menjadi subjek pemberdayaan agar dapat terbentuk suatu system komunitas dalam pengawasan secara internal.

Tahap terminasi, yaitu tahapan pemutusan atau perpisahan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahapan ini pelaku perubahan tidak serta merta langsung melepas namun tetap melakukan kontak

meskipun tidak secara rutin. Kesimpulannya adalah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus memiliki metode yang sistematis agar tahapan yang dilakukan bisa memiliki hasil yang maksimal.

C. Partisipasi Komunitas

Partisipasi adalah keterlibatan-keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam satu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Sastropoetra, 1998).

Usman *dalam* Soedjono (1990) mengemukakan bahwa ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama, alasan etnis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, bukan menjadi objek. Kedua, alasan sosiologis, yaitu bila perkembangan diharapkan berhasil dalam jangka panjang, ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti macet. Dari definisi diatas ada tiga unsur penting dari konsep partisipasi tersebut, yaitu:

Adanya keterlibatan mental dan emosional, memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi, dan mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok.

Koentjaraningrat (1979), berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat. Affan (1993) memberikan pengertian bahwa partisipasi adalah tingkat

keterlibatan anggota sistem sosial secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Jika dikaitkan dengan daerah tertentu, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat sebagai suatu sistem sosial dalam daerah/wilayah tertentu, secara mental, emosional, material baik secara perorangan (individual) maupun berkelompok dalam suatu kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati bersama antara penyelenggara negara dan masyarakat tersebut.

Inilah partisipasi dan partisiporis, menurut mikkelsen (2005:53-54) biasanya di gunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*participation is the voluntary contribution by people in project, but without their taking part in decision-making*);
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan (*participacion is the sensitization if people to increase their receptivity and ability to respons to development projects*)
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang di tanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu (*participation is an active process, meaning that the person or group in question takes initiative and assets the autonomy to do so*);

4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat (*participation is the fostering a dialog between the local"peopleand the project or progamme preparation implementation, monitoring and evalution staff in order to obtain in formation on the local context and on social impacts*);
5. Partisipasi adalah adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang di tentukan sendiri oleh masyarakat (*participation is the voluntary involvement of people in self determined change*); dan
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri (*participation is inovelment in people's devolepment of themselves, their lives, their environment*).

D. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja factor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.

1. Usia

Faktor usia merupakan factor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “didapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Di katakana sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980 : 9 -10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

- a. Kepercayaan diri masyarakat.
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
- c. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat.
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatannya sendiri;
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai atau menjadi milik masyarakat.

- f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.
- g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- h. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat

E. Komunitas

Komunitas yaitu yang menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Soekanto (1990)

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Community (masyarakat) merupakan bagian kelompok dari masyarakat (society) dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terkait oleh tempat (territorial) (Fairi et al.1980) Menurut Soerjono Soekanto, istilah community dapat di

terjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah lain menunjukkan pada warga-warga sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok baik itu kelompok besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi dapat disebut masyarakat setempat. Intinya mereka menjalin hubungan sosial (*social relationship*). Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat (*community*) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan.

